



Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Fakfak, Papua Barat Berdasarkan Instrumen Evika

Effectiveness of the Fakfak Marine Protected Areas Management, Papua Barat, Based on the Evika Instrument

Rahel Archi Wignyayuwana Randa¹, Paulus Boli², Gandi Y.S. Purba³,
Christover Alfarani Bawole^{4*}, Selvi Tebay⁵

^{1,2,3,4,5} Program Pascasarjana, Universitas Papua, Manokwari
Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat, 98314

Dikirim: 13 Oktober 2023, Disetujui: 3 Desember 2024, Diterbitkan: 11 Desember 2024

DOI: [10.47039/ish.6.2024.123-133](https://doi.org/10.47039/ish.6.2024.123-133)

Inti Sari

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Fakfak membutuhkan evaluasi untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan telah dilaksanakan secara efektif. Evaluasi dilaksanakan menggunakan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). EVIKA telah ditetapkan sebagai instrumen alat ukur pengelolaan kawasan yang telah diterapkan secara luas pada kawasan konservasi perairan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan hasil EVIKA selama tiga tahun (2021-2023) KKP Fakfak, untuk melihat tren perkembangannya dan menunjukkan hasil yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi kriteria lebih banyak pada kriteria *input* dan proses, sedangkan kriteria *output* dan *outcome* capaiannya masih sangat rendah. Faktor-faktor yang berkontribusi baik terhadap pengelolaan KKP Fakfak disumbangkan oleh indikator pengetahuan masyarakat dari komponen *output*, penjangkauan dan pengawasan dari komponen proses, dan sumber daya manusia, rencana pengelolaan, rencana zonasi dan status kawasan dari komponen *input*.

Kata kunci: Efektivitas, penilaian, manajemen, konservasi, Fakfak

Abstract

The Fakfak marine protected areas (Fakfak-MPAs) are evaluated to determine that the park has been managed effectively as indicated in the park management plan. The evaluation use of the Conservation Area Management Effectiveness Evaluation (EVIKA). EVIKA methods have been widely used in marine conservation areas in Indonesia. We use the EVIKA results for three years (2021-2023) from Fakfak-MPA. The result showed that the contribution came from the input and process criteria, while the achievement of the output and outcome criteria was still very low. Factors that contribute well to the management of Fakfak-MPAs were contributed by community knowledge indicators from the output component, outreach and supervision from the Process Component, and human resources, management plans, zoning plans and area status from the Input component.

Keywords: Effectiveness, evaluation, management, conservation, Fakfak

* Korespondensi Penulis

Tlp : +6285298887400

Email : christover.alfa.bawole@gmail.com



©2024 Rahel Archi Wignyayuwana Randa, Paulus Boli, Gandi Y.S. Purba, Christover Alfarani Bawole, Selvi Tebay. Ciptaan disebarluaskan di bawah

Lisensi Creative Commons Atribusi NonKomersial-Berbagi Serupa 4.0 Internasional.

I. Pendahuluan

Pembentukan Kawasan Konservasi (KKP) di Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, maka ditetapkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa untuk kepentingan konservasi, sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pemerintah Indonesia menargetkan sebesar 32,5 juta ha atau 10% dari luas perairan menjadi kawasan konservasi di tahun 2030. Pada tahun 2022 capaian kawasan konservasi perairan Indonesia yang tercatat di Sistem Data Konservasi (SIDAKO) Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai 28.911.919 ha atau sekitar 8,90%.

Kabupaten Fakfak yang terletak di Provinsi Papua Barat dikenal dengan keanekaragaman hayati laut dan daratnya (Allen & Erdmann, 2006). Fakfak juga memiliki berbagai ekosistem penting, termasuk hutan mangrove, terumbu karang, dan hutan tropis yang kaya flora dan fauna endemik. Sebagai bagian dari upaya melindungi kekayaan alam ini, beberapa kawasan di Fakfak telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan (DKP, 2018). Kawasan konservasi ini perlu dipantau secara berkala untuk memastikan kegiatan pengelolaan dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi berkala diperlukan guna memastikan kegiatan pengelolaan kawasan mencapai tujuan dan target konservasi (Carter, 2003; Dahl-Tacconi, 2005; Amkieltiela *et al.*, 2022).

Kawasan Konservasi Perairan Fakfak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Van Den Bossch di Provinsi Papua Barat. Kawasan ini

memiliki potensi perairan yang cukup tinggi dengan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati perairan dan biomassa ikan karang, terdapat 330 spesies ikan karang, pari manta dan cetacean. Selanjutnya, perencanaan pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Peraturan ini memandatkan bahwa kawasan konservasi yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi untuk menilai capaian tujuan pengelolaan. Kawasan Konservasi Perairan Fakfak membentuk satu jaringan konservasi dengan kawasan lain di Papua (Mangubhai *et al.*, 2012; Bawole & Megawanto, 2017;). Kawasan ini melindungi berbagai spesies, termasuk mendukung berbagai perikanan tangkap (Sala, 2017; Mustasim *et al.*, 2019; Boli *et al.*, 2020).

Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Metode ini menggunakan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan 4 kriteria utama: *input*, *proses*, *output* dan *outcome*. Hasil akhir evaluasi dinyatakan dengan Status Dikelola Minimum (nilai 50-85%; perak), dan Dikelola Berkelanjutan (>85%; emas).

II. Metode

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini disusun berdasarkan hasil evaluasi EVIKA 2021-2023 pada bulan Maret-Agustus 2024 di KKP Fakfak.

B. Sumber Data dan Analisis

Status EVIKA KKP Fakfak menggunakan data tahun 2021, 2022 dan 2023 yang dipublikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP 2021; KKP 2022; KKP 2023). Data ini selanjutnya diolah dengan menggunakan aplikasi Excel untuk melihat tren perubahan selama tiga tahun.

Penilaian EVIKA dilakukan dengan menjawab 42 pertanyaan yang dibagi kedalam empat kriteria dan 24 indikator (Tabel 1).

Penelusuran terhadap faktor-faktor yang berpengaruh rendah atau faktor yang

tidak berkontribusi terhadap pengelolaan KKP Fakfak menggunakan nilai EVIKA Tahun 2023 (KKP, 2023). Nilai EVIKA digunakan untuk memilah dan menentukan indikator/faktor-faktor yang perlu dikelola guna mengoptimalkan kinerja pengelolaan KKP Fakfak. Pemilihan faktor-faktor/indikator menggunakan selang 0 (kurang) sampai 100 (sangat baik), dengan selang nilai: 0–25% (buruk), 26–50% (kurang), 51–75% (cukup), dan 76–100% (baik). Selang nilai tersebut, sering digunakan dalam menentukan tingkat pengelolaan sumber daya perairan, misalnya kegiatan perikanan tangkap (Sala *et al.*, 2017), pengelolaan ekosistem karang dalam kawasan konservasi (Bawole *et al.*, 2011, 2013), pengelolaan kawasan konservasi dengan pendekatan kearifan lokal (Boli *et al.*, 2014). Oleh sebab itu, dalam penilaian ini menggunakan nilai $\geq 75\%$ sebagai acuan pemilihan faktor EVIKA yang berkontribusi pada kinerja pengelolaan kawasan konservasi.

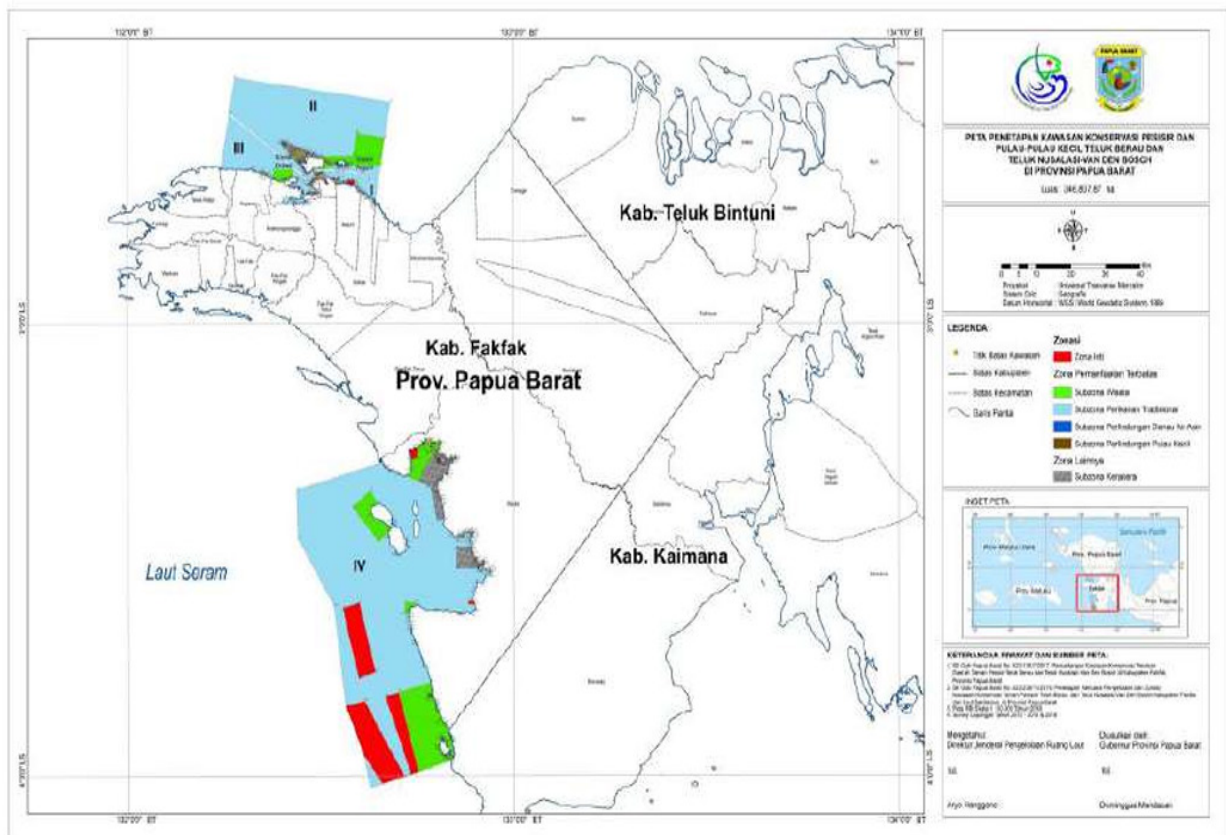
Tabel 1. Jumlah Indikator dan Pertanyaan pada setiap kriteria (KKP, 2023).

Kriteria	Jumlah Indikator	Jumlah Pertanyaan
<i>Input</i>	6	9
<i>Proses</i>	8	12
<i>Output</i>	6	13
<i>Outcome</i>	4	8
Total	24	42

III. Hasil dan Pembahasan

A. Keadaan Umum Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bossch di Provinsi Papua Barat memiliki total luas 346.807,87 ha yang meliputi: Area I Teluk Berau dengan luas 7.804,43 ha, Area II Teluk Berau dengan luas 74.050, 86 ha, Area III Teluk Berau 17.088,51 ha, dan Area IV dengan luas 247.846,07 ha (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bossch di Provinsi Papua Barat (KKP, 2021).

Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Fakfak, Papua Barat Berdasarkan Instrumen Evika

Rahel Archi Wignyayuwana Randa, Paulus Boli, Gandi Y.S. Purba, Christover Alfarani Bawole, Selvi Tebay

B. Pengelolaan Kawasan Konservasi

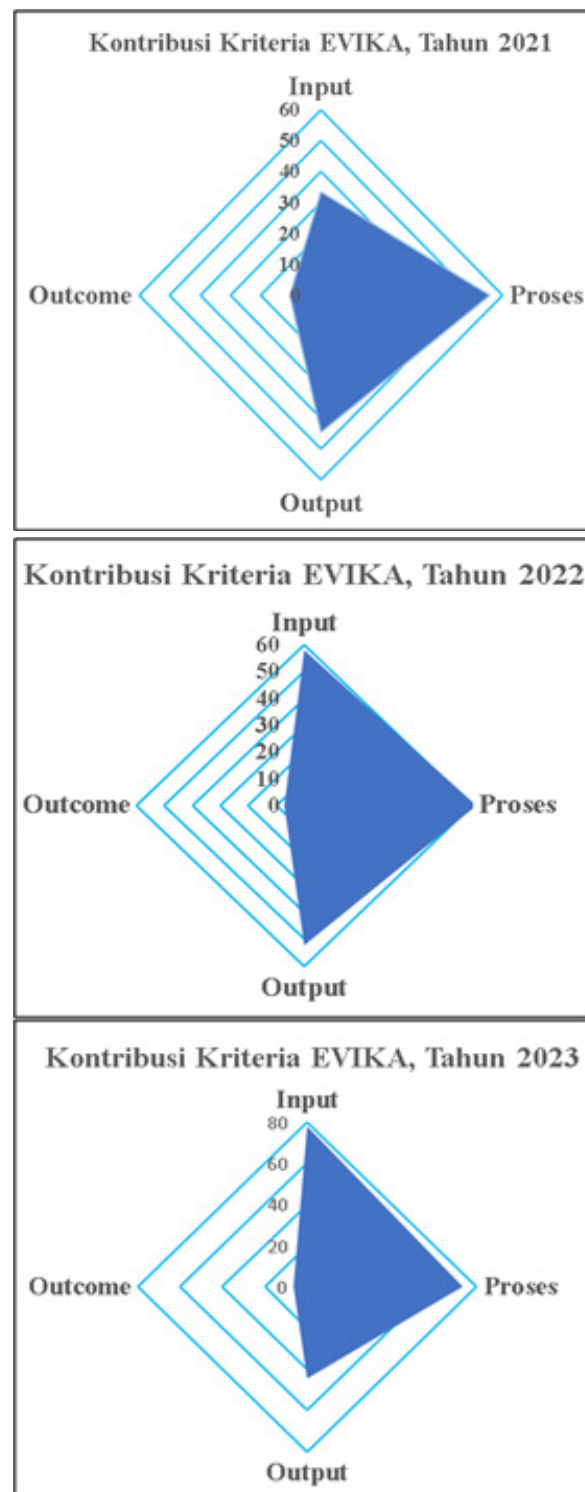
Atas inisiatif Pemerintah Daerah Fakfak melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak beserta dukungan dari Masyarakat Adat Distrik Karas, Kokas dan Arguni, pada November 2016 ketiga distrik tersebut melaksanakan deklarasi adat pengukuhan wilayah Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Van Den Bosch sebagai Kawasan Konservasi (DKP, 2018). Melalui Deklarasi Adat tersebut, Petuanan Adat Atiati, Wertuar, Arguni, dan Ugar Pikipik Sekar menyatakan bahwa:

- Mendukung pengelolaan sumber daya perairan secara bijaksana sebagaimana yang telah ditinggalkan para leluhur sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Berau seluas 99.000 ha di Distrik Kokas dan Arguni serta KKPD Teluk Nusalasi Van Den Bosch seluas 251.000 ha di Distrik Karas.
- Melarang penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan perikanan *illegal* dan mendorong berbagai pemangku kepentingan merealisasikan hal ini.
- Menjadikan masyarakat Adat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan KKPD dan mendorong Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan terkait KKPD tersebut. Gubernur Papua Barat menjawab inisiatif tersebut dengan mengeluarkan SK Nomor 523/136/7/2017 pada tanggal 25 Juli 2017 untuk mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Pesisir Teluk Berau Dan Teluk Nusalasi Van Den Bosch di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dengan luas total 350.000 ha.

C. Status Efektivitas Pengelolaan KKP Fakfak.

Evaluasi efektivitas pengelolaan KKP Fakfak dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia selama tiga tahun (2021–2023). Sebagai instrumen evaluasi, EVIKA diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat. Kualitas pengelolaan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta umpan balik guna intervensi program dan kegiatan. Aspek pengelolaan KKP tersebut, melalui instrumen EVIKA terkategori dalam empat kriteria, yaitu kriteria *input*, *proses*, *output* dan *outcome* (Gambar 2). Kriteria

input mengalami tren meningkat selama tiga tahun dan hal yang sama diperlihatkan oleh kriteria *proses*. Sebaliknya, kriteria *output* agak berfluktuasi, dimana pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023.



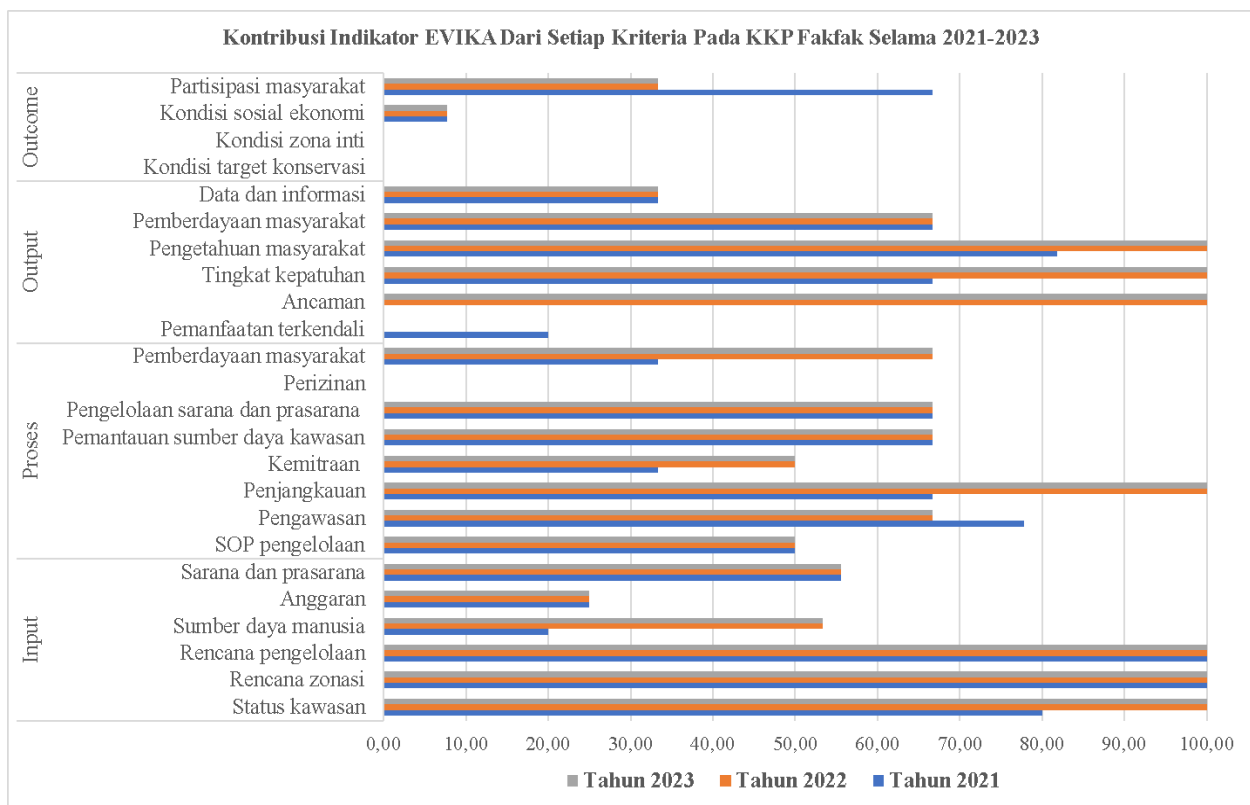
Gambar 2. Tren Perubahan Status EVIKA KKP Fakfak periode 2021–2023

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa capaian kriteria dampak (*outcome*) dan *output* jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian kriteria *input* dan proses. Pada tahun 2023, capaian kriteria *input* dan proses dapat mencapai 80%, dengan capaian kriteria *output* hanya 45% dan kriteria dampak hanya 7%. Harapan dari UPTD bahwa kegiatan pengelolaan KKP Fakfak sesungguhnya adalah tercapainya indikator dampak yang lebih besar dari kriteria lain, namun faktanya pengelolaan yang masih dapat dikatakan belum optimal dilihat dari capaian kriteria *output* dan *outcome*. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya KKP Fakfak baru ditetapkan tahun 2019. Artinya dalam durasi waktu 5 tahun, UPTD masih berkonsentrasi pada pembenahan kantor, rekrutmen staf, sosialisasi KKP pada berbagai pemangku kepentingan, melengkapi sarana/prasarana dan perencanaan penganggaran. Pada tahap lima tahun sebelumnya, UPTD lebih banyak terkonsentrasi pada pembenahan internal manajemen perkantoran.

Kontribusi indikator-indikator dari setiap kriteria (*input*, *proses*, *output* dan *outcome*) menunjukkan bahwa ada indikator yang

muncul setiap tahun (Gambar 3). Kriteria *input* meliputi status kawasan, rencana zonasi, rencana pengelolaan dengan capaian mencapai 100%. Hal yang sama juga terjadi pada kriteria proses, terutama kegiatan penjangkauan, dengan capaian 100%, dari kriteria *output*, indikator ancaman kawasan menurun jauh sebesar 50% dari *baseline data* (hanya satu kasus) pada tahun 2022 dan 2023, termasuk peningkatan kepatuhan dan pengetahuan masyarakat tentang KKP Fakfak.

Rendahnya ancaman berkaitan dengan keberhasilan pengelola mengamankan lokasi melalui kegiatan pengawasan dan patroli kawasan secara rutin. Kegiatan patroli dilakukan kurang lebih empat kali dalam setahun. Hal ini juga berkaitan dengan kegiatan penjangkauan masyarakat yang dilakukan pengelola melalui penyadar-tahuan pentingnya kegiatan konservasi dalam mendukung biodiversitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa kawasan konservasi di Indonesia juga mengalami keberhasilan dengan kegiatan penyadar-tahuan kawasan dalam melindungi dan pemanfaatan berkelanjutan (Magfiroh *et al.*, 2020) dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan (Bato *et al.*, 2013; Dahlan & Septianingsih, 2019), dan dalam



Gambar 3. Kontribusi Kriteria Evika terhadap KKP Fakfak selama periode 2021 -2023

mendukung kegiatan perikanan masyarakat (Yuliana *et al.*, 2016; Rusandi *et al.*, 2021).

Kriteria *outcome* dengan capaian yang sangat rendah untuk semua indikator, kecuali kegiatan pemantauan pada tahun 2023. Artinya, secara keseluruhan dari 24 indikator EVIKA terdapat 17 indikator (misalnya sarana prasarana, anggaran dan sumber daya manusia dari kriteria input) berada pada kondisi yang belum memadai. Kriteria *proses* meliputi semua indikator, kecuali penjangkauan. Kriteria *output* meliputi data dan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Kriteria *outcome* meliputi semua indikator yang belum tercapai. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh banyak faktor terutama keterbatasan pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia serta kapasitas masyarakat (KKP 2021, KKP 2022, KKP 2023).

Rendahnya capaian dari berbagai indikator dapat menjadi umpan balik bagi pengelola UPTD untuk membenahi masalah-masalah yang ada. Tujuh indikator telah memperlihatkan tren perkembangan yang sangat baik selama tiga tahun, yaitu indikator status kawasan, rencana zonasi dan rencana pengelolaan, dengan capaian 100%. Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena kinerja capaiannya hanya dilihat dari ketersediaan dokumen hukum dan administrasi KKP Fakfak. Dokumen-dokumen ini biasanya merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pengelola pada saat pengusulan penetapan kawasan konservasi. Artinya dokumen-dokumen ini merupakan dokumen administratif yang wajib ada dalam kegiatan penetapan kawasan.

Ada 8 indikator dari kriteria proses menunjukkan hanya kegiatan penjangkauan masyarakat yang mencapai 100%, dan dicapai pada tahun 2022 dan 2023. Indikator lain yang meliputi SOP pengelolaan, pengawasan, kemitraan, pemantauan sumber daya kawasan, pengelolaan sarana dan prasarana, perizinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan indikator-indikator dengan capaian rendah. Indikator ini perlu dikelola guna mencapai status pengelolaan berkelanjutan. Kriteria proses ini merupakan tahapan penting dalam memastikan kegiatan dapat berjalan dengan baik pada tingkat masyarakat lokal dan tingkat pemerintahan kabupaten. Hal lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pelibatan *stakeholder* guna mewujudkan pengelolaan yang berkeadilan dalam menjamin hak, tugas dan

fungsi lembaga terhadap kegiatan pengelolaan KKP Fakfak. Sebagaimana dikemukakan oleh pemerhati (Heck *et al.*, 2011; Bawole, 2012; Khanom *et al.*, 2023), keterlibatan *stakeholder* menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kawasan. Keterlibatan *stakeholder* menjadi perhatian serius untuk mengelola Kawasan Konservasi Fakfak ke depan.

Kriteria *output* yang meliputi enam indikator, tiga diantaranya dengan capaian 100% yaitu penurunan tingkat ancaman, tingkat kepatuhan dan pengetahuan masyarakat. Sedangkan indikator pemanfaatan terkendali, pemberdayaan masyarakat, data dan informasi merupakan indikator capaian yang rendah selama tiga tahun. Pemanfaatan terkendali masih menjadi masalah karena berkaitan dengan penetapan status kuota tangkapan, mekanisme pengendalian tangkapan dan armada penangkapan. Data dan informasi secara berkala sering tidak tersedia dalam membangun tata kelola kawasan yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan data runtun (*series*) yang belum tersedia di UPTD.

Kriteria *outcome* yang merupakan target utama dalam kegiatan pengelolaan masih jauh dari sempurna. Kriteria *outcome* ini sering mendapat kendala dalam pencapaiannya, karena berbagai akumulasi faktor yang berasal dari konfigurasi aspek ekologi, sosial, budaya dan kelembagaan (Luang & Campus, 2004; Lockwood, 2010; Bennett & Dearden, 2014). Hal ini terlihat dari 4 indikator yang capaian sangat rendah. Indikator kondisi target konservasi dan kondisi zona inti belum ada capaian. Artinya target konservasi, baik habitat, ekosistem maupun spesies belum tercatat dengan baik, begitu pula dengan zona inti belum dikelola secara baik dan dipandang sama dengan zona-zona lain dari KKP.

Dua indikator dengan kinerja rendah dari kriteria *outcome* adalah kondisi sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat. Pada tahap ini idealnya penetapan KKP dapat menaikkan kondisi sosial ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi faktanya kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan masih pada tahap demonstrasi dan belum pada tahap komersial guna peningkatan pendapatan. Partisipasi masyarakat masih menjadi masalah ketika diperhadapkan pada pilihan mata pencahariannya. Dalam hal ini, masyarakat perlu didorong dalam upaya

mereka mendapatkan manfaat jangka panjang dari kegiatan konservasi, misalnya dengan kegiatan pariwisata bahari.

D. Status EVIKA KKP Fakfak

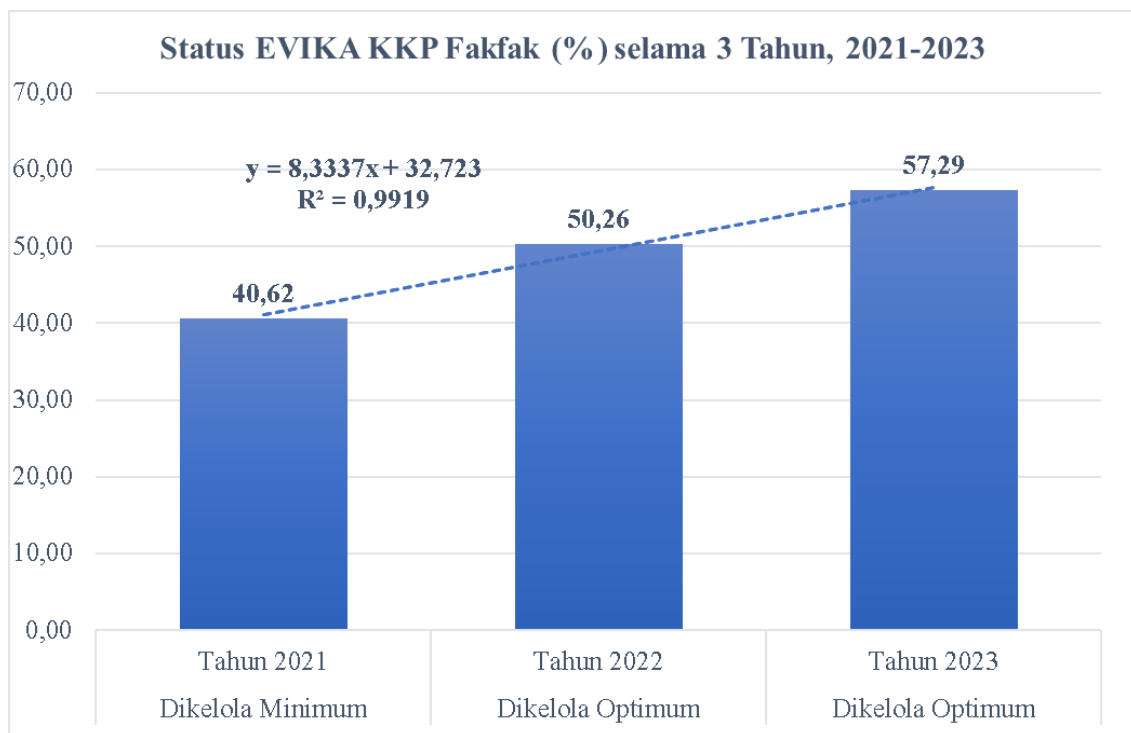
Pemantauan status efektivitas pengelolaan KKP Fakfak menunjukkan tren peningkatan (Gambar 4), dengan $R^2 = 0,99$ yang sangat tinggi. Model prediksi dapat dikatakan sangat baik untuk menggambarkan tren peningkatan status secara kuantitatif, meskipun secara kualitatif kondisi status pada tahun 2022 dan 2023 adalah sama (status dikelola optimum). Artinya pada tahun 2021 memperlihatkan status dikelola minimum (40,62%) meningkat secara nilai persentase menjadi 50,26% pada tahun 2022 dan 57,29% pada tahun 2023, meskipun status pada dua tahun terakhir adalah sama (dikelola optimum). Kategori ini sesuai dengan Keputusan Dirjen PRL Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Status Berdasarkan Nilai Akhir EVIKA adalah <50% (dikelola minimum), > 50 – 85% (dikelola optimum) dan > 85% (dikelola berkelanjutan).

Tren peningkatan ini dapat dikatakan cukup lambat karena dari tahun 2021 ke tahun 2022 hanya menambah 10 poin dan dari

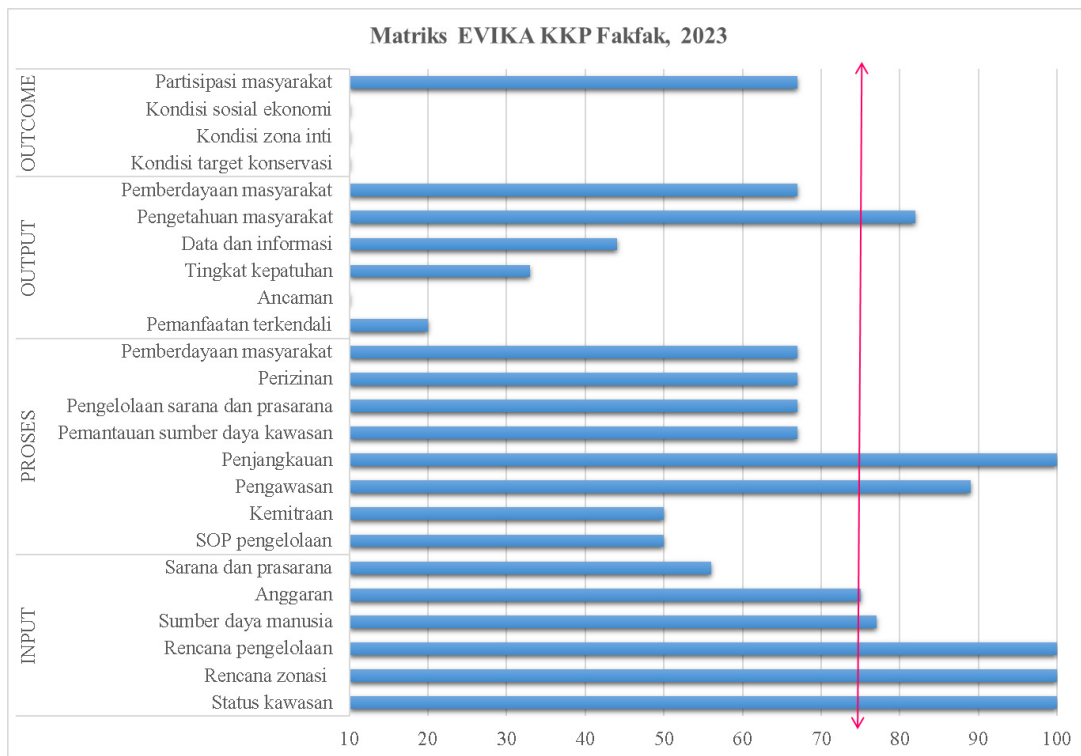
tahun 2022, ke tahun 2023 hanya menambah tujuh poin. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat dari 27 indikator yang ada, hanya tujuh indikator yang memberikan kontribusi baik, atau hanya sekitar 29%. Upaya perbaikan pada indikator-indikator yang belum memberikan dampak berarti (indikator-indikator dari kriteria *output* dan *outcome*) menjadi prioritas kegiatan pengelolaan kedepan. Keberhasilan KKP terletak pada dampak positif jangka panjang, baik terhadap peningkatan biodiversitas maupun pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Drew, 2005; Wu *et al.*, 2014; Marvin *et al.*, 2016).

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan KKP Fakfak

Berbagai potensi sumber daya pesisir dan laut Fakfak beserta tantangannya mengindikasikan perlunya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Fakfak sehingga tantangan yang ada dapat berubah menjadi peluang, dan potensi yang ada dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat untuk kelestarian sumber daya alam (Gambar 5).



Gambar 4. Status Efektivitas Pengelolaan KKP Fakfak periode 2021 – 2023.



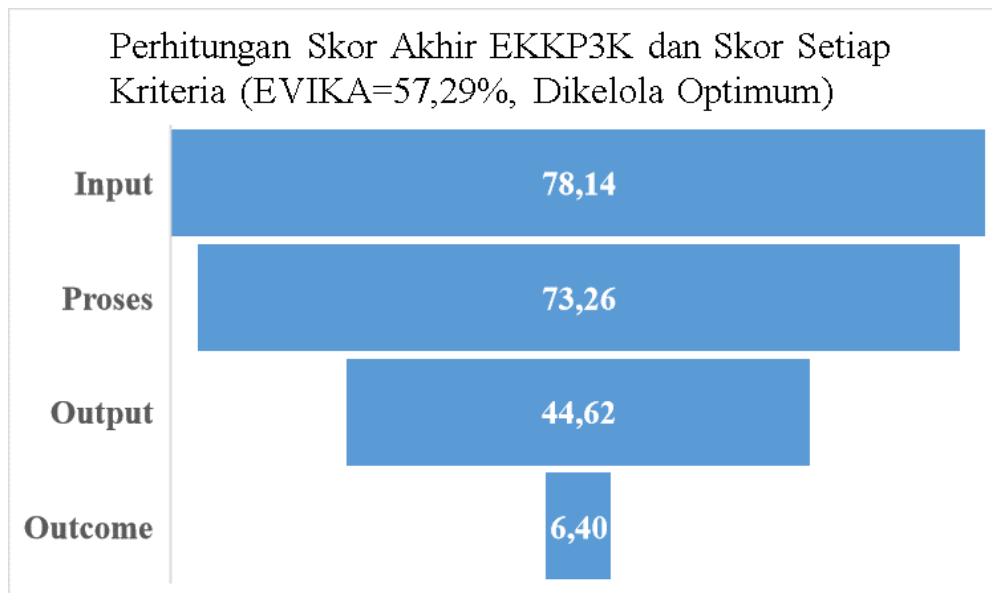
Gambar 5. Matriks EVIKA Tahun 2023

Gambar 5 memperlihatkan faktor-faktor yang perlu dikendalikan guna mengoptimalkan pengelolaan KKP Fakfak menjadi nilai $\geq 75\%$ digunakan sebagai acuan pemilihan. Pemilihan faktor-faktor yang berkontribusi baik terhadap pengelolaan KKP Fakfak disumbangkan oleh indikator pengetahuan masyarakat dari komponen *output*, penjangkauan dan pengawasan dari komponen proses, dan sumber daya manusia, rencana pengelolaan, rencana zonasi dan status kawasan dari komponen *input*. Terdapat sekitar 7 indikator EVIKA sebagai faktor penyumbang dalam mewujudkan pengelolaan yang baik bagi KKP Fakfak. Ada sekitar 17 indikator sebagai penyebab rendahnya kinerja pengelolaan KKP Fakfak. Dalam hal ini, ada sekitar 70,83% indikator yang berkontribusi buruk terhadap pengelolaan. Indikator ini terdistribusi pada berbagai kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*. Indikator penyumbang paling tinggi sebagai penyebab rendahnya pengelolaan adalah *output* dan *outcome*. Pada kriteria ini hanya pengetahuan masyarakat yang memberikan pengaruh positif. Hal ini karena secara rutin pengelola melakukan penyadar-

tahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kawasan konservasi dalam melindungi biodiversitas yang ada. Hal ini sesuai dengan temuan di beberapa kawasan konservasi berkaitan dengan pengetahuan masyarakat dalam mendukung kegiatan konservasi (Berkes *et al.*, 2000, 2008; Evans, 2010; Raymond *et al.*, 2010; Paulangan *et al.*, 2021;).

KKP ditetapkan sejak tahun 2018 (enam tahun beroperasi) sudah semestinya mendapatkan capaian *output* dan *outcome* berada pada kondisi lebih baik, namun faktanya belum tercapai sebagaimana dibahas sebelumnya. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang lebih jauh untuk menggambarkan faktor penghambat pengelolaan yang ada, dengan cara mengidentifikasi 17 indikator, yang akan dibahas pada uraian berikutnya.

Perhitungan skor akhir EVIKA menunjukkan bahwa pengelolaan KKP Fakfak berada pada kondisi dikelola optimum, dengan presentasi capaian adalah 57,29% (Gambar 6). Kondisi ini dapat ditingkatkan untuk menjamin implementasi kegiatan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.



Gambar 6. Perhitungan Skor Akhir KKP Fakfak

IV. Kesimpulan

Tujuh indikator EVIKA sebagai faktor penyumbang dalam mewujudkan pengelolaan yang baik bagi KKP Fakfak dan sekitar 17 faktor lainnya sebagai penyebab rendahnya kinerja. Selanjutnya ada sekitar 70,83% faktor yang berkontribusi buruk terhadap pengelolaan.

Faktor penyumbang paling tinggi sebagai penyebab rendahnya pengelolaan berasal dari kriteria *output* dan *outcome*. Pada kriteria ini hanya pengetahuan masyarakat yang memberikan pengaruh positif dan pengelola kawasan melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kawasan konservasi untuk melindungi biodiversitas yang ada.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala UPT KKP Kaimana dan staf atas penyediaan data; dukungan dari DKP Provinsi Papua Barat atas izin studi dan dalam publikasi artikel ini; Pemda Fakfak melalui Dinas Perikanan dan masyarakat atas kegiatan penelitian dan kesediaannya sebagai responden. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada mitra pembangunan dalam dukungan informasi dan berbagai diskusi.

V. Daftar Pustaka

- Allen, G., & Erdmann, M. (2006). *Rapid Surveys of Marine Conservation Potential in the Papuan Bird's Head Seascape*.
- Amkieltiela, Handayani, C. N., Andradi-Brown, D. A., Estradivari, Ford, A. K., Beger, M., Hakim, A., Muenzel, D. K., Carter, E., Agung, F., Veverka, L., Iqbal, M., Lazuardi, M. E., Fauzi, M. N., Tranter, S. N., & Ahmadia, G. N. (2022). The rapid expansion of Indonesia's marine protected area requires improvement in management effectiveness. *Marine Policy*, 146. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105257>
- Bato, M., Yulianda, F., & Fahrudin, A. (2013). Kajian manfaat kawasan konservasi perairan bagi pengembangan ekowisata bahari: Studi kasus di kawasan konservasi perairan Nusa Penida, Bali. *Depik*, 2(3). <https://doi.org/10.13170/depik.2.2.777>
- Bawole, R., Yulianda, F., Bengen, D. G., Fahrudin, A., Pascasarjana, S., Bogor, I. P., Dramaga, J. R., & Dramaga, K. I. P. B. (2011). Keberlanjutan Penatakelolaan Zona Pemanfaatan Tradisional dalam Kawasan Konservasi Laut Taman Nasional Teluk Cenderawasih Papua Barat National Park of Cenderawasih Bay, West Papua. *Jmht*, XVII(2), 71–78.

- Bawole, R. (2012). Analysis and Mapping of Stakeholders in Traditional Use Zone within Marine Protected Area. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 18(2), 110–117. <https://doi.org/10.7226/jtfm.18.2.110>
- Bawole, R., Rumere, V., Mudjirahayu, M., & Pattiasina, T. F. (2013). Performance of Coral Reef Management within Marine Protected Areas: Integrating Ecological, Socioeconomic, Technological, and Institutional Dimensions. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*. <https://doi.org/10.7226/jtfm.19.1.63>
- Bawole Roni; Megawanto, R. (2017). Coastal And Ocean Establishing Of Aquatic Protected Areas (Apas) Network In Papua' S Bird Head Seasscape. *Coastal And Ocean Journal*, 1(September), 189–200.
- Bawole, R., Yulianda, F., Bengen, D. G., Fahrudin, A., Mudjirahayu, & Rembet, U. N. (2018). *Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan: Sistem Tata Kelola, Sistem Yang Dikelola, Dan Tata Kelola Interaktif: Vol. I*. CV. Alfabeta Bandung.
- Bennett, N. J., & Dearden, P. (2014). From measuring outcomes to providing inputs: Governance, management, and local development for more effective marine protected areas. *Marine Policy*, 50(PA), 96–110. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.05.005>
- Bennett, N. J., Roth, R., Klain, S. C., Chan, K., Christie, P., Clark, D. A., Cullman, G., Curran, D., Durbin, T. J., Epstein, G., Greenberg, A., Nelson, M. P., Sandlos, J., Stedman, R., Teel, T. L., Thomas, R., Verissimo, D., & Wyborn, C. (2017). Conservation social science: Understanding and integrating human dimensions to improve conservation. *BIOC*, 205, 93–108. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.10.006>
- Berkes, F., Folke, C., & Colding, J. (2000). Rediscovery Of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. *Ecological Applications*, 10(5), 1251–1262. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010\[1251:ROTEKA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2)
- Berkes, F., Colding, J., Folke, C., Applications, E., & Oct, N. (2008). *Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management*. 10(5), 1251–1262.
- Boli, P., Irna, S., Tebay, S., Simatauw, F., Parenden, D., Luhulima, I., Ananta, A., & Rotinsulu, C. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Ikan Terbang Di Wilayah Perairan Provinsi Papua Barat*.
- Carter, D. W. (2003). Protected areas in marine resource management: Another look at the economics and research issues. *Ocean and Coastal Management*, 46(5), 439–456. [https://doi.org/10.1016/S0964-5691\(03\)00017-6](https://doi.org/10.1016/S0964-5691(03)00017-6)
- Dahlan, A., & Septianingsih, E. (2019). Status dan Tingkat Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Sulawesi. *Prosiding Seminar Nasional Perikanan Dan Kelautan VIII, 24 Januari 2020*.
- Dahl-Tacconi, N. (2005). Investigating information requirements for evaluating effectiveness of marine protected areas - Indonesian case studies. *Coastal Management*, 33(3). <https://doi.org/10.1080/08920750590951956>
- DKP. (2018). *Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Berau Dan Taman Pesisir Teluk Nusalasi – Van Den Bosch Di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat*.
- Drew, J. A. (2005). Use of traditional ecological knowledge in marine conservation. *Conservation Biology*, 19(4), 1286–1293. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00158.x>
- Evans, L. S. (2010). Ecological knowledge interactions in marine governance in Kenya. *Ocean & Coastal Management*, 53(4), 180–191. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2010.01.009>
- Heck, N., Dearden, P., & McDonald, A. (2011). Stakeholders' expectations towards a proposed marine protected area: A multi-criteria analysis of MPA performance criteria. *Ocean & Coastal Management*, 54(9), 687–695. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2011.07.003>
- Khanom, S., MD., M. R., & Md., F. I. (2023). Stakeholders' Role in Protected Area Tourism Development: A Thematic Analysis. *International Journal of Economics and Management Studies*, 10(5). <https://doi.org/10.14445/23939125/ijems-v10i5p102>

- KKP. (2021). *Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)*.
- KKP. (2022). *Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)*.
- KKP. (2023). *Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)*.
- Lockwood, M. (2010). Good governance for terrestrial protected areas: A framework, principles and performance outcomes. *Journal of Environmental Management*, 91(3), 754–766. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.10.005>
- Luang, K., & Campus, C. (2004). *Using local user perceptions to evaluate outcomes of protected area management in the Sagay Marine Reserve , Philippines*. 31(2), 138–148. <https://doi.org/10.1017/S0376892904001377>
- Magfiroh, A.N, Zairon, & Fahrudin, A. (2020). Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 12(2). <https://doi.org/10.29244/jitkt.v12i2.29262>
- Mangubhai, S., Erdmann, M. V, Wilson, J. R., Huffard, C. L., Ballamu, F., Hidayat, N. I., Hitipeuw, C., Lazuardi, M. E., Muhajir, Pada, D., Purba, G., Rotinsulu, C., Rumetna, L., Sumolang, K., & Wen, W. (2012). Papuan Bird's Head Seascape: Emerging threats and challenges in the global center of marine biodiversity. *Marine Pollution Bulletin*, 64(11), 2279–2295. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.07.024>
- Marvin, D. C., Pin, L., Lynam, A. J., Wich, S., Davies, A. B., Krishnamurthy, R., Stokes, E., Starkey, R., & Asner, G. P. (2016). Integrating technologies for scalable ecology and conservation. *Global Ecology and Conservation*, 7, 262–275. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.07.002>
- Mustasim Mustasim, Zainuddin, M., Syafruddin, & Sutono, D. (2019). Preferensi Parameter Oseanografi (SPL dan klorofil-a) Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Cakalang di Perairan Pulau Misool dan Fakfak. *Jurnal Airaha*, 8(01). <https://doi.org/10.15578/ja.v8i1.107>
- Paulangan, Y. P., Barapadang, B., & Amin, A. (2021). Sistem Pengetahuan dan Kearifan Lokal “ Dabom ” di Kampung Muris , Distrik Demta Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 13(1).
- Raymond, C. M., Fazey, I., Reed, M. S., Stringer, L. C., Robinson, G. M., & Evely, A. C. (2010). Integrating local and scientific knowledge for environmental management. *Journal of Environmental Management*, 91(8), 1766–1777. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.03.023>
- Rusandi, A., Hakim, A., Wiryawan, B., & Yulianto, I. (2021). Pengembangan kawasan konservasi untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 12(2), 137–147.
- Sala, R. (2017). Relative abundance of skipjack tuna (*Katsuwonus pelamis* L.) in waters around sorong and Fak-Fak, West Papua, Indonesia. *ACL Bioflux*, 10(3).
- Sala, R., Simbolon, D., Wisudo, S. H., Haluan, J., & Yusfiandayani, R. (2017). Multidimensional Analysis of Fisheries Sustainability In Traditional Use Zone of Misool, Raja Ampat, Indonesia. *International Journal of Deveelopment Research*, 7(2014).
- Wu, R., Long, Y., Malanson, G. P., Garber, P. A., Zhang, S., Li, D., Zhao, P., Wang, L., & Duo, H. (2014). Optimized spatial priorities for biodiversity conservation in China: A systematic conservation planning perspective. *PLoS ONE*, 9(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103783>
- Yuliana, E., Boer, M., Fahrudin, A., Kamal, M. M., & Muttaqin, E. (2016). Status Stok Ikan Karang Target Di Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 22(1), 9. <https://doi.org/10.15578/jppi.22.1.2016.9-16>